



BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI
TENTANG PENJABARAN APBD

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245); Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4400);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4421);Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);Peraturan daerah kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan

Otonomi Khusus Provinsi Papua;

13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024;
21. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Fak-Fak Nomor S-24/KPN.3303/2024 Hal Penyampaian Informasi Mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening RDF Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Kaimana Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAIMANA

Dan

BUPATI KAIMANA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAIMANA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. Rp 1.245.805.195.308,- (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.873.574.465,- (dua

puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.172.627.500,- (delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.572.735.775,- (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.258.791.190,- (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh datu ribu seratus Sembilan puluh rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.869.420.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.172.627.500,- (delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Paiak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2);

- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 747.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.715.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.625.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.701.862.500,- (satu miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.872.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.890.000.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.572.735.775,- (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;

c. Retribusi Perizinan Tertentu;

- (2) Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.690.000.000,- (delapan miliar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 882.735.775,- (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.258.791.190,- (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Pernyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.258.791.190,- (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.869.420.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;

- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 802.420.000,- (delapan ratus dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.616.000.000,- (tiga miliar enam ratus enam belas juta rupiah).
 - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
 - (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp 1.214.467.616.080,- (satu triliun dua ratus empat belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.203.809.908.000,- (satu triliun dua ratus tiga miliar delapan ratus Sembilan juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.657.708.080,- (sepuluh

miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 11

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.464.004.763,- (tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (1) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.464.004.763,- (tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.391.741.316.728,- (satu triliun tiga ratus Sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 13

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 1.007.567.434.669,- (satu triliun tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 345.705.878.263,- (tiga ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 553.886.727.206,- (lima ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah)
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 92.878.499.600,- (Sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.596.329.600,- (tiga belas miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 345.705.878.263,- (tiga ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan Tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 187.926.817.775,- (seratus delapan puluh tujuh miliar Sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.114.987.755,- (seratus tiga puluh tiga miliar seratus empat belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.478.648.760, - (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.125.848.179,- (tiga belas miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 305.975.794,- (tiga ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 753.600.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 553.886.727.206,- (lima ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta

tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat; dan
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 276.908.295.490,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar Sembilan ratus delapan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.536.624.821,- (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.181.677.704,- (Sembilan belas miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 78.635.508.200,- (tujuh puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain /Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32.532.016.491,- (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam belas ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.092.604.500,- (tiga belas miliar Sembilan puluh dua juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 92.878.499.600,- (Sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.836.389.600,- (delapan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh Sembilan enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.893.060.000,- (satu miliar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 818.520.000,- (delapan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.330.530.000,- (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.596.329.600,-

(tiga belas miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat ;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.444.836.000,- (enam miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.951.493.600,- (enam miliar Sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 210.461.375.617,- (dua ratus sepuluh miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan ;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.471.821.312,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.931.780.087,- (tiga puluh Sembilan miliar Sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.134.322.955,- empat puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 124.813.353.259,- (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.042.098.004,- (satu miliar empat puluh dua juta Sembilan puluh delapan ribu empat rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 163.712.506.442,- (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan;

(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 163.712.506.442,- (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)

Pasal 23

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 145.936.121.420,- (seratus empat puluh lima miliar

Sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 24

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp. 146.621.121.420,- (seratus empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus dua satu ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 146.621.121.420,- (seratus empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).

Pasal 25

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 146.621.121.420,- (seratus empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 146.621.121.420,- (seratus empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pembiayaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol).

Pasal 27

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 145.936.121.420,- (seratus empat puluh lima miliar Sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 145.936.121.420,- (seratus empat puluh lima miliar Sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 28

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran I Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 29

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 30

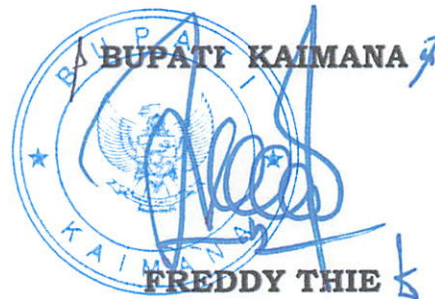
Pelaksanaan peniabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bupati menetapkan peraturan Bupati Kaimana tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 31

Peraturan Bupati Kaimana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kaimana

Pada tanggal 05 Maret 2024


BUPATI KAIMANA
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana

Pada tanggal 05 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KAIMANA


Drs. DONALD R. WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 437



KABUPATEN KAIMANA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 27.873.574.465,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 8.172.627.500,00 |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 747.000.000,00 |
| 4.1.01.06.01 | Pajak Hotel | 320.000.000,00 |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel | 320.000.000,00 |
| 4.1.01.06.03 | Pajak Losmen | 30.000.000,00 |
| 4.1.01.06.03.0001 | Pajak Losmen | 30.000.000,00 |
| 4.1.01.06.05 | Pajak Wisma Pariwisata | 397.000.000,00 |
| 4.1.01.06.05.0001 | Pajak Wisma Pariwisata | 397.000.000,00 |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 1.715.000.000,00 |
| 4.1.01.07.01 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 55.000.000,00 |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 55.000.000,00 |
| 4.1.01.07.02 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 50.000.000,00 |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 50.000.000,00 |
| 4.1.01.07.03 | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya | 30.000.000,00 |
| 4.1.01.07.03.0001 | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya | 30.000.000,00 |
| 4.1.01.07.05 | Pajak Warung dan Sejenisnya | 80.000.000,00 |
| 4.1.01.07.05.0001 | Pajak Warung dan Sejenisnya | 80.000.000,00 |
| 4.1.01.07.07 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 1.500.000.000,00 |
| 4.1.01.07.07.0001 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 1.500.000.000,00 |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 77.625.000,00 |
| 4.1.01.08.05 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 75.625.000,00 |
| 4.1.01.08.05.0001 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 75.625.000,00 |
| 4.1.01.08.09 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 2.000.000,00 |
| 4.1.01.08.09.0001 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 2.000.000,00 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 93.000.000,00 |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 62.000.000,00 |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 62.000.000,00 |
| 4.1.01.09.02 | Pajak Reklame Kain | 25.000.000,00 |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain | 25.000.000,00 |
| 4.1.01.09.03 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 1.000.000,00 |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 1.000.000,00 |
| 4.1.01.09.05 | Pajak Reklame Berjalan | 5.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan | 5.000.000,00 |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 1.701.862.500,00 |
| 4.1.01.10.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 26.500.000,00 |
| 4.1.01.10.01.0001 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 26.500.000,00 |
| 4.1.01.10.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 1.675.362.500,00 |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 1.675.362.500,00 |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 75.000.000,00 |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah | 75.000.000,00 |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 75.000.000,00 |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.872.000.000,00 |
| 4.1.01.14.23 | Pajak Pasir dan Kerikil | 102.000.000,00 |
| 4.1.01.14.23.0001 | Pajak Pasir dan Kerikil | 102.000.000,00 |
| 4.1.01.14.30 | Pajak Tanah Liat | 20.000.000,00 |
| 4.1.01.14.30.0001 | Pajak Tanah Liat | 20.000.000,00 |
| 4.1.01.14.37 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 1.750.000.000,00 |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 1.750.000.000,00 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 1.890.000.000,00 |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2 | 1.890.000.000,00 |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 1.890.000.000,00 |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 1.140.000,00 |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 670.000,00 |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 670.000,00 |
| 4.1.01.16.02 | BPHTB-Pemberian Hak Baru | 470.000,00 |
| 4.1.01.16.02.0001 | BPHTB-Pemberian Hak Baru | 470.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 9.572.735.775,00 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 8.690.000.000,00 |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 7.515.000.000,00 |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 15.000.000,00 |
| 4.1.02.01.01.0005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah | 7.500.000.000,00 |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 100.000.000,00 |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 100.000.000,00 |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 150.000.000,00 |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 150.000.000,00 |
| 4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 925.000.000,00 |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran | 200.000.000,00 |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los | 25.000.000,00 |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios | 700.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 882.735.775,00 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 199.750.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 195.500.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan | 3.250.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan | 1.000.000,00 |
| 4.1.02.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 78.000.000,00 |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 78.000.000,00 |
| 4.1.02.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 7.000.000,00 |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 7.000.000,00 |
| 4.1.02.02.10 | Retribusi Penyeberangan di Air | 60.000.000,00 |
| 4.1.02.02.10.0002 | Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang | 60.000.000,00 |
| 4.1.02.02.11 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 337.985.775,00 |
| 4.1.02.02.11.0001 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman | 37.985.775,00 |
| 4.1.02.02.11.0004 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan | 300.000.000,00 |
| 4.1.02.02.17 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 200.000.000,00 |
| 4.1.02.02.17.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 200.000.000,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.258.791.190,00 |
| 4.1.03.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 2.258.791.190,00 |
| 4.1.03.01.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 2.258.791.190,00 |
| 4.1.03.01.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 2.258.791.190,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 7.869.420.000,00 |
| 4.1.04.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 310.000.000,00 |
| 4.1.04.01.02 | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | 310.000.000,00 |
| 4.1.04.01.02.0030 | Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses | 30.000.000,00 |
| 4.1.04.01.02.0054 | Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 280.000.000,00 |
| 4.1.04.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 802.420.000,00 |
| 4.1.04.03.01 | Hasil Sewa BMD | 598.000.000,00 |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD | 598.000.000,00 |
| 4.1.04.03.02 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 204.420.000,00 |
| 4.1.04.03.02.0001 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 204.420.000,00 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 3.616.000.000,00 |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 3.500.000.000,00 |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 3.500.000.000,00 |
| 4.1.04.05.02 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 116.000.000,00 |
| 4.1.04.05.02.0001 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 116.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 3.000.000.000,00 |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 3.000.000.000,00 |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 3.000.000.000,00 |
| 4.1.04.12 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 96.000.000,00 |
| 4.1.04.12.06 | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 2.500.000,00 |
| 4.1.04.12.06.0001 | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 2.500.000,00 |
| 4.1.04.12.07 | Pendapatan Denda Pajak Restoran | 5.000.000,00 |
| 4.1.04.12.07.0002 | Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 5.000.000,00 |
| 4.1.04.12.08 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan | 6.000.000,00 |
| 4.1.04.12.08.0002 | Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana | 6.000.000,00 |
| 4.1.04.12.09 | Pendapatan Denda Pajak Reklame | 1.000.000,00 |
| 4.1.04.12.09.0001 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron | 1.000.000,00 |
| 4.1.04.12.10 | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan | 5.000.000,00 |
| 4.1.04.12.10.0002 | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 5.000.000,00 |
| 4.1.04.12.12 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 1.500.000,00 |
| 4.1.04.12.12.0001 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 1.500.000,00 |
| 4.1.04.12.14 | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 10.000.000,00 |
| 4.1.04.12.14.0037 | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya | 10.000.000,00 |
| 4.1.04.12.15 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 65.000.000,00 |
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2 | 65.000.000,00 |
| 4.1.04.13 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 45.000.000,00 |
| 4.1.04.13.01 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum | 45.000.000,00 |
| 4.1.04.13.01.0026 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios | 45.000.000,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.214.467.616.080,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.203.809.908.000,00 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 949.164.038.000,00 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 128.363.502.000,00 |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 16.792.781.000,00 |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 2.602.911.000,00 |
| 4.2.01.01.01.0006 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 46.877.250.000,00 |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 47.120.634.000,00 |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 10.187.951.000,00 |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 4.781.975.000,00 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 671.005.975.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU | 486.409.181.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0002 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 400.000.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0004 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 24.179.256.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2.01.01.02.0005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 80.033.494.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0006 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 38.819.114.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0007 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | 41.164.930.000,00 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 80.780.120.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 269.727.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 3.689.956.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 4.528.975.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0004 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA | 4.749.573.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 3.004.326.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 37.914.697.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0054 | DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler | 6.898.735.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0058 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting | 2.043.718.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 17.680.413.000,00 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 69.014.441.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | 23.073.490.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 505.000.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 17.978.723.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 660.000.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD | 11.028.942.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 1.001.620.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 494.220.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 3.245.285.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0013 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas | 8.826.181.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 396.601.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0021 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 1.804.379.000,00 |
| 4.2.01.03 | Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur | 168.282.790.000,00 |
| 4.2.01.03.02 | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat | 144.134.704.000,00 |
| 4.2.01.03.02.0002 | Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat | 144.134.704.000,00 |
| 4.2.01.03.05 | Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat | 24.148.086.000,00 |
| 4.2.01.03.05.0002 | Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat | 24.148.086.000,00 |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 86.363.080.000,00 |
| 4.2.01.05.01 | Dana Desa | 86.363.080.000,00 |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa | 86.363.080.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 10.657.708.080,00 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 10.657.708.080,00 |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 10.657.708.080,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 941.407.005,00 |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 661.875.476,00 |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 5.899.053.896,00 |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 3.155.371.703,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 3.464.004.763,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 3.464.004.763,00 |
| 4.3.03.02 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 3.464.004.763,00 |
| 4.3.03.02.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 3.464.004.763,00 |
| 4.3.03.02.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 3.464.004.763,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 1.245.805.195.308,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.007.567.434.669,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 345.705.878.263,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 187.926.817.775,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 140.143.536.583,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 121.352.954.198,00 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 18.790.582.385,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 9.767.836.308,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 9.194.748.543,00 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 573.087.765,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 4.787.446.742,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 4.787.446.742,00 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 5.470.851.900,00 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 5.104.926.900,00 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 365.925.000,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 4.702.905.400,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 3.530.152.650,00 |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 1.172.752.750,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 12.189.863.999,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 10.703.380.639,00 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 1.486.483.360,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 1.460.817.783,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1.460.817.783,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 6.590.033,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 6.451.475,00 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 138.558,00 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 7.539.750.696,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 6.712.350.291,00 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 827.400.405,00 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 371.742.251,00 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 327.749.067,00 |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 43.993.184,00 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 1.011.581.779,00 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 879.603.176,00 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 131.978.603,00 |
| 5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 246.707.144,00 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 246.707.144,00 |
| 5.1.01.01.14 | Belanja Tunjangan Khusus*) | 227.187.157,00 |
| 5.1.01.01.14.0001 | Belanja Tunjangan Khusus*) | 227.187.157,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 133.114.987.755,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 67.662.052.386,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 60.457.289.338,00 |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 7.204.763.048,00 |
| 5.1.01.02.02 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN | 25.025.388.457,00 |
| 5.1.01.02.02.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS | 23.736.023.457,00 |
| 5.1.01.02.02.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK | 1.289.365.000,00 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 73.622.556,00 |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 73.622.556,00 |
| 5.1.01.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 40.183.524.356,00 |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 35.774.300.756,00 |
| 5.1.01.02.04.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK | 4.409.223.600,00 |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 170.400.000,00 |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 170.400.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 10.478.648.760,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 10.478.648.760,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 8.849.640.760,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 58.208.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | 1.570.800.000,00 |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 13.125.848.179,00 |
| 5.1.01.04.01 | Belanja Uang Representasi DPRD | 623.805.000,00 |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD | 623.805.000,00 |
| 5.1.01.04.02 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 62.019.300,00 |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 62.019.300,00 |
| 5.1.01.04.03 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 46.200.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 46.200.000,00 |
| 5.1.01.04.04 | Belanja Uang Paket DPRD | 44.299.500,00 |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD | 44.299.500,00 |
| 5.1.01.04.05 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 642.342.750,00 |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 642.342.750,00 |
| 5.1.01.04.06 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 116.532.150,00 |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 116.532.150,00 |
| 5.1.01.04.08 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.887.500.000,00 |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.887.500.000,00 |
| 5.1.01.04.09 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 892.500.000,00 |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 892.500.000,00 |
| 5.1.01.04.10 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 169.445.471,00 |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 169.445.471,00 |
| 5.1.01.04.11 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD | 29.400.000,00 |
| 5.1.01.04.11.0001 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD | 29.400.000,00 |
| 5.1.01.04.12 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 3.324.304.008,00 |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 257.551.256,00 |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 1.063.188,00 |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD | 3.189.564,00 |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 3.062.500.000,00 |
| 5.1.01.04.13 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.287.500.000,00 |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.287.500.000,00 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 305.975.794,00 |
| 5.1.01.05.01 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 54.600.000,00 |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 54.600.000,00 |
| 5.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 7.734.800,00 |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 7.734.800,00 |
| 5.1.01.05.03 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 113.316.000,00 |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 113.316.000,00 |
| 5.1.01.05.04 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 13.253.656,00 |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 13.253.656,00 |
| 5.1.01.05.05 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 10.266.538,00 |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 10.266.538,00 |
| 5.1.01.05.06 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 2.000.000,00 |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 2.000.000,00 |
| 5.1.01.05.07 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 102.184.000,00 |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 102.184.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.05.08 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 655.200,00 |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 655.200,00 |
| 5.1.01.05.09 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 1.965.600,00 |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 1.965.600,00 |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 753.600.000,00 |
| 5.1.01.06.01 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 453.600.000,00 |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 453.600.000,00 |
| 5.1.01.06.02 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 300.000.000,00 |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 300.000.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 553.886.727.206,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 276.908.295.490,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 255.761.869.344,00 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 1.372.695.801,00 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 115.471.750,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 27.664.857.882,00 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 1.079.130.600,00 |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 87.813.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 4.398.600.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 362.375.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 7.352.705.865,00 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 101.045.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 17.300.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | 476.664.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.888.086.811,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7.117.374.560,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.998.386.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 888.978.564,00 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 55.800.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata | 296.993.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1.807.800.405,00 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 8.867.666.132,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 134.860.014.686,00 |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 13.712.028.088,00 |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 180.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 42.750.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0051 | Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya | 1.058.105.625,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.760.590.725,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 30.446.423.350,00 |
| 5.1.02.01.01.0055 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 732.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 2.176.194.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 5.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 10.360.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD | 585.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 2.800.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0062 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 4.200.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 434.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 3.360.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | 123.646.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0071 | Belanja Pakaian Kerja Laboratorium | 10.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0072 | Belanja Pakaian Kerja Bengkel | 28.046.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 143.806.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 221.600.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka | 272.200.000,00 |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 6.114.588.000,00 |
| 5.1.02.01.02.0004 | Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu | 4.115.688.000,00 |
| 5.1.02.01.02.0006 | Belanja Komponen-Komponen Lainnya | 64.500.000,00 |
| 5.1.02.01.02.0013 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya | 1.934.400.000,00 |
| 5.1.02.01.04 | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | 15.031.838.146,00 |
| 5.1.02.01.04.0036 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 11.000.000.000,00 |
| 5.1.02.01.04.0049 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 480.000.000,00 |
| 5.1.02.01.04.0107 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian | 7.614.600,00 |
| 5.1.02.01.04.0117 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 971.701.450,00 |
| 5.1.02.01.04.0122 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur | 2.187.500,00 |
| 5.1.02.01.04.0123 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 62.971.000,00 |
| 5.1.02.01.04.0126 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat | 15.000.000,00 |
| 5.1.02.01.04.0133 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | 87.562.200,00 |
| 5.1.02.01.04.0134 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar | 82.986.700,00 |
| 5.1.02.01.04.0254 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film | 12.000.000,00 |
| 5.1.02.01.04.0406 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 226.662.690,00 |
| 5.1.02.01.04.0410 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 18.900.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.01.04.0411 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 151.178.356,00 |
| 5.1.02.01.04.0433 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air | 20.500.000,00 |
| 5.1.02.01.04.0494 | Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 483.369.600,00 |
| 5.1.02.01.04.0503 | Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya | 150.000.000,00 |
| 5.1.02.01.04.0510 | Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 438.224.050,00 |
| 5.1.02.01.04.0521 | Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 670.980.000,00 |
| 5.1.02.01.04.0541 | Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum | 150.000.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 133.536.624.821,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 103.338.461.222,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.975.011.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5.257.144.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 146.900.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 88.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | 359.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 221.870.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 303.160.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 902.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 95.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 25.308.305.244,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 39.795.380.590,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 3.405.923.665,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 3.082.580.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 240.670.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 930.635.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 84.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 55.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 56.900.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 480.062.500,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 270.320.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 6.308.694.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 123.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 4.793.257.188,00 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 164.940.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0066 | Belanja Registrasi/Keanggotaan | 120.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 895.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0069 | Belanja Pengolahan Air Limbah | 4.116.208.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0075 | Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 | 757.500.035,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 12.709.378.400,00 |
| 5.1.02.02.02.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.070.000.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 6.780.261.600,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 4.859.116.800,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 4.780.898.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | 25.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 3.739.896.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0061 | Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik | 2.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 65.505.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | 3.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 885.847.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0133 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 3.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0134 | Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar | 1.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0135 | Belanja Sewa Peralatan Cetak | 2.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0237 | Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya | 35.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum | 12.800.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0460 | Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara | 5.850.000,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 1.495.306.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 922.120.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0018 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara | 9.936.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 359.250.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 204.000.000,00 |
| 5.1.02.02.06 | Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi | 3.045.781.770,00 |
| 5.1.02.02.06.0003 | Belanja Sewa Jalan Kabupaten | 3.045.781.770,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 102.774.929,00 |
| 5.1.02.02.08.0006 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik | 0,00 |
| 5.1.02.02.08.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya | 62.774.929,00 |
| 5.1.02.02.08.0026 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah | 40.000.000,00 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 7.106.354.500,00 |
| 5.1.02.02.09.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan | 2.185.458.200,00 |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 115.540.300,00 |
| 5.1.02.02.09.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata | 100.000.000,00 |
| 5.1.02.02.09.0016 | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata | 461.154.000,00 |
| 5.1.02.02.09.0017 | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata | 2.694.202.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.02.09.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata-an | 1.400.000.000,00 |
| 5.1.02.02.09.0022 | Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata-an | 150.000.000,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 957.670.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan | 957.670.000,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 19.181.677.704,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 12.194.495.973,00 |
| 5.1.02.03.02.0034 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya | 70.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 167.600.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 4.993.574.500,00 |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 843.810.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 1.106.740.400,00 |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 756.748.850,00 |
| 5.1.02.03.02.0048 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang | 667.920.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0062 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis | 200.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 514.767.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 851.284.160,00 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 709.407.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1.066.415.163,00 |
| 5.1.02.03.02.0124 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran | 16.228.900,00 |
| 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio | 50.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 180.000.000,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 5.550.056.731,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 4.886.286.656,00 |
| 5.1.02.03.03.0006 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 426.138.075,00 |
| 5.1.02.03.03.0010 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 10.000.000,00 |
| 5.1.02.03.03.0032 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum | 227.632.000,00 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.437.125.000,00 |
| 5.1.02.03.04.0100 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 1.410.000.000,00 |
| 5.1.02.03.04.0131 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya | 27.125.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 78.635.508.200,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 78.635.508.200,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 46.861.387.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap | 27.386.649.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.119.500.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 267.972.200,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 32.532.016.491,00 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 2.457.514.170,00 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 1.835.514.170,00 |
| 5.1.02.05.01.0011 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 622.000.000,00 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 30.074.502.321,00 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 29.995.402.321,00 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 79.100.000,00 |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 13.092.604.500,00 |
| 5.1.02.88.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 13.092.604.500,00 |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 13.092.604.500,00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 1.500.000.000,00 |
| 5.1.04.03 | Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta | 1.500.000.000,00 |
| 5.1.04.03.01 | Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta | 1.500.000.000,00 |
| 5.1.04.03.01.0001 | Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta | 1.500.000.000,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 92.878.499.600,00 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 82.836.389.600,00 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 45.308.966.600,00 |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 45.308.966.600,00 |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 14.755.637.000,00 |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 14.755.637.000,00 |
| 5.1.05.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 20.771.786.000,00 |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 20.771.786.000,00 |
| 5.1.05.05.06 | Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 2.000.000.000,00 |
| 5.1.05.05.06.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 2.000.000.000,00 |
| 5.1.05.06 | Belanja Hibah Dana BOS | 1.893.060.000,00 |
| 5.1.05.06.01 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri | 260.000.000,00 |
| 5.1.05.06.01.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri | 260.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.05.06.02 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 1.633.060.000,00 |
| 5.1.05.06.02.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 1.633.060.000,00 |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 818.520.000,00 |
| 5.1.05.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 818.520.000,00 |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 818.520.000,00 |
| 5.1.05.08 | Belanja Hibah Dana BOSP | 7.330.530.000,00 |
| 5.1.05.08.01 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS | 5.834.690.000,00 |
| 5.1.05.08.01.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS | 5.834.690.000,00 |
| 5.1.05.08.02 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD | 1.001.620.000,00 |
| 5.1.05.08.02.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD | 1.001.620.000,00 |
| 5.1.05.08.03 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan | 494.220.000,00 |
| 5.1.05.08.03.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan | 494.220.000,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 13.596.329.600,00 |
| 5.1.06.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 6.444.836.000,00 |
| 5.1.06.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 6.278.168.000,00 |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 6.278.168.000,00 |
| 5.1.06.01.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 166.668.000,00 |
| 5.1.06.01.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 166.668.000,00 |
| 5.1.06.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 200.000.000,00 |
| 5.1.06.03.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 200.000.000,00 |
| 5.1.06.03.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 200.000.000,00 |
| 5.1.06.04 | Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 6.951.493.600,00 |
| 5.1.06.04.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 6.951.493.600,00 |
| 5.1.06.04.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 6.951.493.600,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 210.461.375.617,00 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 3.471.821.312,00 |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | 3.471.821.312,00 |
| 5.2.01.01.01 | Belanja Modal Tanah Persil | 975.326.312,00 |
| 5.2.01.01.01.0004 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 975.326.312,00 |
| 5.2.01.01.03 | Belanja Modal Lapangan | 2.496.495.000,00 |
| 5.2.01.01.03.0007 | Belanja Modal Tanah untuk Jalan | 150.000.000,00 |
| 5.2.01.01.03.0015 | Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan | 2.346.495.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 39.931.780.087,00 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 198.900.000,00 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 198.900.000,00 |
| 5.2.02.01.03.0004 | Belanja Modal Electric Generating Set | 24.500.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 135.000.000,00 |
| 5.2.02.01.03.0016 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya | 39.400.000,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 14.023.571.330,00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 663.516.330,00 |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 52.650.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 472.256.330,00 |
| 5.2.02.02.01.0005 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 138.610.000,00 |
| 5.2.02.02.03 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor | 13.360.055.000,00 |
| 5.2.02.02.03.0001 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang | 158.470.000,00 |
| 5.2.02.02.03.0002 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 13.201.585.000,00 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 383.820.000,00 |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | 45.320.000,00 |
| 5.2.02.03.01.0003 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik | 45.320.000,00 |
| 5.2.02.03.02 | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin | 4.500.000,00 |
| 5.2.02.03.02.0002 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik | 4.500.000,00 |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 334.000.000,00 |
| 5.2.02.03.03.0009 | Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain | 278.000.000,00 |
| 5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya | 56.000.000,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 4.455.488.207,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 1.107.251.974,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 1.107.251.974,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 3.348.236.233,00 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 174.950.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 432.251.300,00 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 2.278.034.730,00 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 463.000.203,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 1.768.867.122,00 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 1.559.648.322,00 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 800.200.000,00 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 192.350.000,00 |
| 5.2.02.06.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar | 387.098.322,00 |
| 5.2.02.06.01.0004 | Belanja Modal Peralatan Cetak | 180.000.000,00 |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 209.218.800,00 |
| 5.2.02.06.02.0002 | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB | 106.618.800,00 |
| 5.2.02.06.02.0011 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | 102.600.000,00 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 10.327.414.923,00 |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 10.327.414.923,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 10.327.414.923,00 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 102.346.798,00 |
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 371.800,00 |
| 5.2.02.08.01.0010 | Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik | 371.800,00 |
| 5.2.02.08.02 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 27.074.998,00 |
| 5.2.02.08.02.0003 | Belanja Modal General Laboratory Tool | 24.434.998,00 |
| 5.2.02.08.02.0005 | Belanja Modal Laboratory Safety Equipment | 2.640.000,00 |
| 5.2.02.08.03 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | 1.000.000,00 |
| 5.2.02.08.03.0011 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga | 1.000.000,00 |
| 5.2.02.08.04 | Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 28.900.000,00 |
| 5.2.02.08.04.0005 | Belanja Modal System/Power Supply | 28.900.000,00 |
| 5.2.02.08.05 | Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 25.000.000,00 |
| 5.2.02.08.05.0002 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja | 25.000.000,00 |
| 5.2.02.08.08 | Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica | 20.000.000,00 |
| 5.2.02.08.08.0015 | Belanja Modal Photo and Film Equipment | 20.000.000,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 5.306.161.207,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 1.865.215.332,00 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 1.865.215.332,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 3.440.945.875,00 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 3.440.945.875,00 |
| 5.2.02.11 | Belanja Modal Alat Eksplorasi | 221.675.000,00 |
| 5.2.02.11.02 | Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika | 221.675.000,00 |
| 5.2.02.11.02.0002 | Belanja Modal Elektronik/Electric | 221.675.000,00 |
| 5.2.02.13 | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 318.858.000,00 |
| 5.2.02.13.03 | Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian | 318.858.000,00 |
| 5.2.02.13.03.0002 | Belanja Modal Alat Pengolahan Air | 318.858.000,00 |
| 5.2.02.14 | Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi | 35.000.000,00 |
| 5.2.02.14.01 | Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi | 35.000.000,00 |
| 5.2.02.14.01.0002 | Belanja Modal Elektrik | 35.000.000,00 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 90.000.000,00 |
| 5.2.02.18.03 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut | 90.000.000,00 |
| 5.2.02.18.03.0001 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut | 90.000.000,00 |
| 5.2.02.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 565.320.000,00 |
| 5.2.02.19.01 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 565.320.000,00 |
| 5.2.02.19.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik | 25.100.000,00 |
| 5.2.02.19.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Permainan | 540.220.000,00 |
| 5.2.02.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 2.134.357.500,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.02.88.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 2.134.357.500,00 |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 2.134.357.500,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 41.134.322.955,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 38.112.000.925,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 26.185.558.939,00 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 376.722.715,00 |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 10.525.835.316,00 |
| 5.2.03.01.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 1.070.645.058,00 |
| 5.2.03.01.01.0009 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 243.471.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 12.147.166.162,00 |
| 5.2.03.01.01.0012 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 262.128.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0013 | Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga | 123.267.688,00 |
| 5.2.03.01.01.0025 | Belanja Modal Bangunan Terbuka | 120.213.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 1.316.110.000,00 |
| 5.2.03.01.02 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 11.926.441.986,00 |
| 5.2.03.01.02.0001 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan I | 1.899.485.058,00 |
| 5.2.03.01.02.0002 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan II | 652.195.058,00 |
| 5.2.03.01.02.0003 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan III | 5.195.291.870,00 |
| 5.2.03.01.02.0005 | Belanja Modal Asrama | 1.967.621.000,00 |
| 5.2.03.01.02.0012 | Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun | 2.211.849.000,00 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 3.022.322.030,00 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 3.022.322.030,00 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | 3.022.322.030,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 124.813.353.259,00 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 101.357.470.523,00 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 100.650.685.823,00 |
| 5.2.04.01.01.0003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten | 82.812.030.605,00 |
| 5.2.04.01.01.0004 | Belanja Modal Jalan Kota | 14.025.757.323,00 |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | 2.166.797.895,00 |
| 5.2.04.01.01.0008 | Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang | 1.646.100.000,00 |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 706.784.700,00 |
| 5.2.04.01.02.0011 | Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal | 706.784.700,00 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 15.741.230.736,00 |
| 5.2.04.02.02 | Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut | 14.562.030.736,00 |
| 5.2.04.02.02.0004 | Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut | 14.562.030.736,00 |
| 5.2.04.02.04 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 380.000.000,00 |
| 5.2.04.02.04.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai | 380.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.04.02.05 | Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 799.200.000,00 |
| 5.2.04.02.05.0002 | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air | 600.000.000,00 |
| 5.2.04.02.05.0005 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air | 199.200.000,00 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 7.714.652.000,00 |
| 5.2.04.03.01 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | 2.115.952.000,00 |
| 5.2.04.03.01.0005 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2.115.952.000,00 |
| 5.2.04.03.05 | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik | 5.598.700.000,00 |
| 5.2.04.03.05.0009 | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 5.598.700.000,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.042.098.004,00 |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 418.320.004,00 |
| 5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 277.370.004,00 |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum | 232.180.004,00 |
| 5.2.05.01.01.0005 | Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa | 650.000,00 |
| 5.2.05.01.01.0006 | Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam | 650.000,00 |
| 5.2.05.01.01.0007 | Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis | 21.140.000,00 |
| 5.2.05.01.01.0008 | Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga | 22.750.000,00 |
| 5.2.05.01.02 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 140.950.000,00 |
| 5.2.05.01.02.0001 | Belanja Modal Audio Visual | 140.950.000,00 |
| 5.2.05.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 623.778.000,00 |
| 5.2.05.88.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 623.778.000,00 |
| 5.2.05.88.88.8888 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 623.778.000,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 68.000.000,00 |
| 5.2.06.01 | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 68.000.000,00 |
| 5.2.06.01.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 68.000.000,00 |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | 68.000.000,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 10.000.000.000,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000,00 |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000,00 |
| 5.3.01.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000,00 |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 163.712.506.442,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 163.712.506.442,00 |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 163.712.506.442,00 |
| 5.4.02.05.01 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 163.712.506.442,00 |
| 5.4.02.05.01.0002 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa | 163.712.506.442,00 |
| | Jumlah Belanja | 1.391.741.316.728,00 |
| | Total Surplus/(Defisit) | -145.936.121.420,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 146.621.121.420,00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 146.621.121.420,00 |
| 6.1.01.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 146.621.121.420,00 |
| 6.1.01.07.01 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 146.621.121.420,00 |
| 6.1.01.07.01.0001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 146.621.121.420,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 685.000.000,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 685.000.000,00 |
| 6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 685.000.000,00 |
| 6.2.02.02.01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 685.000.000,00 |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 685.000.000,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 685.000.000,00 |
| | Pembiayaan Netto | 145.936.121.420,00 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 |

Kab. Kaimana, 5 Maret 2024

